

Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar

Ujianti Tawakkal¹, irham²

¹ Dosen Program Studi Akutansi, Universitas Wirabhakti Makassar

² Dosen Administrasi Pemerintahan, Politeknik LP3I Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja keuangan dan menganalisis penggunaan anggaran pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan . Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif, Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Adapun rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan instansi ini yaitu Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari rasio efektivitas dimulai pada tahun 2022 sebesar 7,40% pada tahun 2023 sebesar 7,48% dan sebesar 8,73% pada tahun 2023 belum dapat berjalan secara efektif karena masih dibawah 60% walaupun berkembangannya setiap tahun mengalami kemajuan. Setelah mengetahui besarnya varians yang terjadi serta penyebab-penyebab yang mengakibatkan terjadinya varians, sehingga jika manajemen dapat memperoleh umpan balik dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya sehingga varians yang terjadi dapat ditekan

Kata kunci: Kinerja, Keuangan

Copyright (c) 2024 Ujianti Tawakkal

✉Corresponding author :

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang 2 lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan profinsi melalui dana pertimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana pertimbangan. Dana pertimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai "alat penguji" dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui suatu perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Proses manajemen adalah sejumlah kegiatan yang saling berkaitan yang dipergunakan oleh manajemen suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi manajemen berikut ini : perencanaan, pengaturan, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

Semakin komplekslah masalah yang menyebabkan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran atau lengkapnya budget adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran.

Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang otonom karena mempunyai sasaran serta cara-cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang membedakan dan yang membedakan dengan sasaran serta cara kerja pada bidang lain yang ada dalam perusahaan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai suatu sub-sistem, yakni bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Demikian pula halnya dengan Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari perencanaan anggaran mulai dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut.

1. Kinerja Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas data atau aktivitas usaha tersebut. Laporan keuangan ini sering dipakai untuk menilai keberhasilan manajemen, sehingga kebenaran data yang dilaporkan manajemen dalam laporan tersebut dipertanggung jawabkan melalui laporan keuangan atas posisi keuangan maupun perkembangan suatu usaha yang dapat dinilai dari efisiensi manajemen usaha tersebut.

Laporan keuangan meliputi :

1. Neraca
2. Perhitungan Rugi Laba
3. Laporan perubahan modal atau laba ditahan.

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu usaha terpadu pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan. Menurut Hardianto (2017), neraca merupakan ringkasan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan Balance Sheet. Definsi kinerja keuangan yang dikemukakan di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan meliputi usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menarik dan mengumpulkan dana beserta modal dengan biaya yang rendah dan dengan syarat yang menguntungkan serta secara efisien dan efektif (Sudirman, et al 2024).

2. Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, disusun (oleh manajemen), dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan perkembangan tentang perkembangan secara periodic, dan berkenaan dengan status investasi didalam perusahaan serta hasil usahanya secara periodic (akuntansi) yang bersangkutan. Laporan keuangan ini merupakan gambaran kombinasi dari kejadian-kejadian atau fakta yang dicatat, konsep dasar dan konvensi-konvensi yang dipakai dalam akuntansi, dan pendapatan-pendapatan atau pertimbangan-pertimbangan pribadi (manajemen). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Rahmi ,et al 2022). Konsep dasar, konvensi serta pendapat atau pertimbangan pribadi yang digunakan itu sangat mewarnai dan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai hasil dari penyelenggaraan akuntansi didalam suatu perusahaan hanya mampu menghasilkan informasi sesuai dengan kegunaan akuntansi yaitu :

1. Untuk mengukur sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, persediaan, dan mesin-mesin.
2. Untuk menentukan dan menggambarkan kewajiban-kewajiban serta model atau hak-hak para pemilik dalam perusahaan, seperti hutang dagang dan saham yang beredar.
3. Untuk mengukur perubahan dalam sumber-sumber, kewajiban dan modal.
4. Untuk menentukan laba rugi periodik dari usaha perusahaan.
5. Untuk menyatakan lain-lain aspek mengenai kegiatan perusahaan dalam suatu mata uang sebagai alat ukurnya.

3. Pengambilan Keputusan

Secara sederhana pengambilan keputusan (decision making) berarti, suatu proses memilih alternative tertentu dari beberapa alternative yang ada, mengambil keputusan adalah suatu proses dalam memilih antara berbagai macam cara untuk melaksanakan sesuatu. Agar lebih mudah memahami tujuan manajemen keuangan perusahaan, perlu diketahui pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, pengumpulan dana untuk biaya investasi secara efisien, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan

menyeluruh. Dengan demikian, fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan perusahaan dapat dibagi menjadi tiga area utama, yaitu keputusan investasi atau penggunaan dana, keputusan pendanaan atau mendapatkan dana dan keputusan manajemen aktiva, termasuk mengatur pembagian keputusan. Setiap rasio keuangan mempunyai tujuan dan manfaat yang sesuai dengan maksud penekanan dari analisa rasio keuangan yang dilakukan (Sudirman, et al 2023)

4. Keputusan Keuangan

Tujuan manajemen keuangan perusahaan sebenarnya tercermin dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini kegiatan manajemen terbatas pada kegiatan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi perencanaan sumber keuangan (pembelanjaan), perencanaan alokasi keuangan (investasi), serta penentuan struktur aktiva (kekayaan), keuangan dan modal perusahaan. Dengan demikian, maka tugas pokok manajemen suatu perusahaan adalah merencanakan sesuatu perolehan dan penggunaan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan-keputusan keuangan itu yakni (1). Keputusan investasi (investment decision), (2) keputusan pendanaan (financing decision), dan (3) keputusan pengelolaan asset (assets management decision). Alasan keputusan pendanaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan, dikarenakandalamkenyataannya menunjukkan bahwa dalam mengoperasikan aktivitas perusahaannya, tidak mengambil kebijakan keuangan dalam menentukan keputusan pendanaan (Nurdi,M, et.al,2019)

5. Anggaran

Perkembangan selanjutnya, anggaran telah didefinisikan oleh para pakar secara berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai unsure kesamaan yaitu merupakan suatu rencana yang merupakan disusun secara sistematis, dan dinyatakan oleh suatu organisasi/perusahaan dalam jangka tertentu, biasanya satu tahun. Lebih jelasnya definisi anggaran dikutip dari berbagai sumber seperti dibawah ini :

Defenisi anggaran menurut R.A. Supriyono (2017)

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukan bagaimana sumber-sumber yang akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun”.

Penyusunan anggaran adalah suatu proses penentuan peran setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program atau bagian dari program. Dalam proses ini pimpinan pusat pertanggungjawaban berperan serta dalam mengajukan usulan anggarannya sekaligus melakukan negosiasi dengan pimpinan atasannya yang telah memberikan peran kepadanya. Dalam proses ini anggaran yang telah disahkan merupakan pernyataan kesanggupan/komitmen pimpinan pusat tanggung jawab untuk melaksanakannya, sehingga anggaran tersebutsekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendali kegiatan.

Untuk memberikan gambaran tentang fungsi dan kegunaan anggaran, maka kita dapat mengambil suatu perumpamaan rute / arah yang harus ditempuh sebuah pesawat terbang untuk mudah mencapai tujuan / sarasannya. Jika anggaran dapat diumpamakan rute yang harus ditempuh sebuah pesawat

untuk mencapai tujuan / sasaran, maka pembahasan akan lebih mudah dipahami, betapa pentingnya sebuah anggaran bagi perusahaan demi keselamatan dan kelangsungan hidup atau demi tercapainya sasaran tersebut.

6. Perencanaan

Pengertian menurut R.A. Supriyono (2016) dalam bukunya akuntansi manajemen I, yaitu : “perencanaan adalah memilih beberapa alternatif yang kemungkinan untuk dilaksanakan dimasa depan dengan pertimbangan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang dihadapinya dimasa yang akan datang”.

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : Diduga bahwa kinerja keuangan pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja keuangan dan menganalisis penggunaan anggaran pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan .Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Observasi yaitu mengamati langsung aktivitas kegiatan-kegiatan usaha dan proses kegiatan pembukuan keuangan. Dalam penelitian ini digunakan Data kuantitatif Data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka yang diperoleh dari buku laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya mengenai saluran distribusi atau berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan data primer Data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak pimpinan perusahaan, hal ini sebagai responden utama serta beberapa anggota staff dan karyawan instansi terkait, Data sekunder Data yang diperoleh dari dari laporan, dokumen dan literatur yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini serta informasi tertulis maupun brosur dari dalam perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan digunakan alat analisis deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Adapun rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan instansi ini yaitu Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1. Profil

Inspektorat Provinsi Sulsel Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan Merupakan Lembaga Pengawas

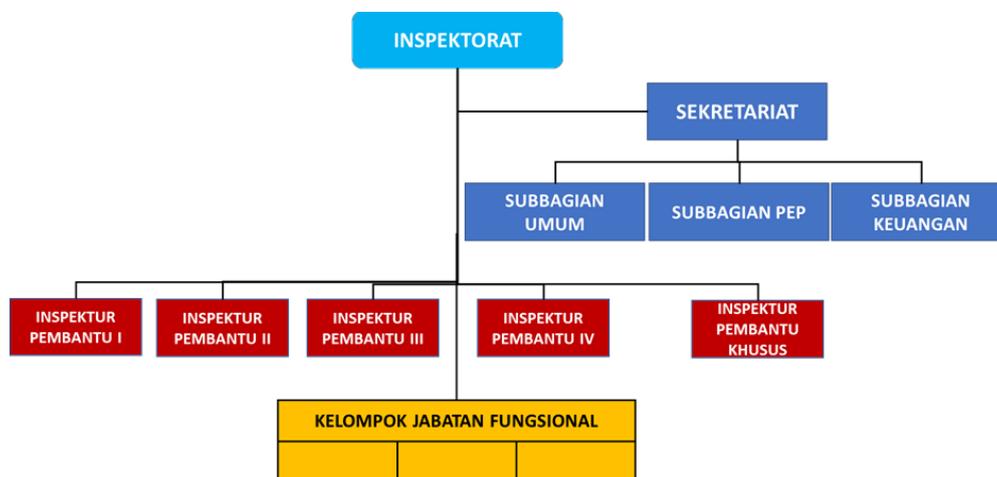
Internal yang berkewajiban Mengawal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan. Fungsi Pembinaan dilaksanakan Melalui berbagai upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur pengawasan internal agar dapat berfungsi sebagai manajemennya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna berhasil, guna sementara maksud dari pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan dimasa yang datang

2. Visi dan Misi

Visi instansi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Menjadi Lembaga Pengawasan yang Profesional dan Responsif untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Misi instansi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan terdapat urusan serta Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan Teknis dan Etika pengawas agar dapat mandiri melaksanakan tugas pengawasan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah
3. Mendorong peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparat pemerintah daerah serta meningkatkan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pembinaan dan pengawasan.
4. Mencegah secara dini terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan tindakan KKN melalui Pembinaan dan Pengawasan.
5. Mendorong Peran serta Masyarakat terhadap Pelaksanaan pengawasan pelayanan Publik dan Kegiatan Pembangunan.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

2. Kebijakan Penyusunan Anggaran

Suatu perencanaan yang dituangkan dalam bentuk anggaran tahunan perlu adanya sistem atau metode pengendalian atau pelaksanaan anggaran tersebut, sehingga sasaran dapat dicapai, tidak jauh menyimpang dari hal yang telah direncanakan semula. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sistem pengendalian terhadap biaya operasional.

Menggunakan analisis varians biaya operasional dengan membandingkan antara biaya operasional yang dianggarkan antara biaya operasional yang dianggarkan dengan biaya operasional yang sesungguhnya.

Berikut ini akan disajikan data anggaran dan realisasinya serta variansnya yang menguntungkan atau merugikan.

Anggaran dan realisasi tahun 2022

Uraian		Anggaran	Realisasi	Variance	
		2022	2022	Positif	Negatif
1		2	3	4	5
A.	Program Pelayanan Adm. Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.795.500	-		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000	-		
3	Penyediaan Jasa Adm.Keuangan	93.556.000			
4	Peyediaan ATK	25.636.228	-		
5	Penyediaan barang cetakan	59.895.100	-		
6	Penyediaan makanan & minuman	9.820.200	-		
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.860.000	-		
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	262.859.000	-		
9	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	-	-		
10	Penyedia Tenaga Tehnis perkantoran	-	-		
11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	95.700.000	-		
12	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	-	-		
13	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.735.700	-		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-		
		589.857.728			
B.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana				
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	33.640.000	-		
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12.800.000	-		

	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.030.000	-		
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.744.000	-		
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-		
	6	Pengadaan Mobeleur	26.730.000	-		
	7	Rehab sedang/berat gedung kantor	-	-		
			84.944.000			
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-		
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-		
	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-		
	3	Penyusunan program kerja SKPD	-	-		
	4	Penyusunan pelaporan keuangan Semeteran	-	-		
	5	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-		
E.	Program Pendidikan Kedinasan					
	1	Pendidikan dan pelatihan teknis	-	-		
	2	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	32.000.000	30.775.000	1.225.000	
			32.000.000	30.775.000	1.225.000	
F.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS	1.162.714.000	1.161.944.000	770.000	
	2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS	148.000.000	148.000.000	-	
	3	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD	-	-		
	4	Bimbingan teknis penyusunan formasi	-	-		
	5	Validasi Data Base	-	-		

			1.310.714.000	1.309.944.000	770.000	
G.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
	1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	82.288.000	65.666.000	16.622.000	
	2	Seleksi penerimaan calon PNS	437.063.840	378.576.840	58.487.000	
	3	Penempatan PNS	45.716.000	39.507.000	6.209.000	
	4	Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	161.879.063	151.838.963	10.040.100	
	5	Pembangunan/pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah	-	-		
	6	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	-	-		
	7	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	-	-		
	8	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	-	-		
	9	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	435.600.000	394.600.000	41.000.000	
	10	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	46.531.250	45.732.250	799.000	
			1.209.078.153	1.075.921.053	133.157.100	

Pada table menunjukkan perbandingan biaya operasional yang dianggarkan dengan realisasinya pada tahun 2022. Dari data tersebut menunjukkan biaya operasional dianggarkan sebesar Rp. 3.226.593.873 ,- dan realisasi sebesar Rp. 2.416.640.053,-

Untuk membuktikan pengendalian biaya operasional yang dilakukan Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Maka ini dapat dilihat melalui analisis varians biaya operasional yaitu suatu analisis yang berfungsi untuk membandingkan antara biaya operasional yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui varians biaya operasional yang merugikan atau menguntungkan sebagai berikut :

Biaya operasional yang dianggarkan : Rp. 3.226.593.873,-
 Biaya operasional yang sesungguhnya : Rp. 2.416.640.053,-
 Varians biaya operasional Rp. 1.351.521.000,-

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.416.640.053}{3.226.593.873} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas PAD tahun 2022 , jika dimasukan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 7,48% masih berada pada interval 60% yang berarti tidak efektif.

Anggaran dan realisasi tahun 2023

Uraian		Anggaran	Realisasi	Variance	
		2023	2023	Positif	Negatif
1		2	3	4	5
A	Program Pelayanan Adm. Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.627.500	4.757.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000	16.783.124	8.416.876	
3	Penyediaan Jasa Adm.Keuangan	95.961.000	65.086.000	30.875.000	
4	Peyediaan ATK	6.633.048	6.633.048	-	
5	Penyediaan barang cetakan	42.703.500	40.902.000	1.801.500	
6	Penyediaan makanan & minuman	12.156.000	12.156.000	-	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.278.000	2.278.000	0	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	489.830.000	489.661.000	169.000	
9	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	-	-		
10	Penyedia Tenaga Tehnis perkantoran	-	14.100.000		14.100.000
11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	30.229.219	7.226.250		23.002.969
12	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	-	-		
13	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.025.000	2.025.000		

			718.643.267	661.607.422	41.262.376	37.102.969
B	Program Peningkatan sarana dan Prasarana					
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.540.000	19.462.500	1.077.500		
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	16.225.000	14.059.000	2.166.000		
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.010.000	2.664.000	1.346.000		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.540.000	-			20.540.000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-			
6	Pengadaan Mobeleur	-	-			
7	Rehab sedang/berat gedung kantor	-	-			
		61.315.000	36.185.500	4.589.500		20.540.000
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-			
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-			
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.751.500	16.761.450	2.990.050		
3	Penyusunan program kerja SKPD	-	-			
4	Penyusunan pelaporan keuangan Semeteran	7.463.000	7.463.000			
5	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-			
E	Program Pendidikan Kedinasan					
1	Pendidikan dan pelatihan teknis	-	-			
2	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	201.920.000	181.105.000	20.815.000		
		229.134.500	205.329.450	23.805.050		
F	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					

1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS	1.200.933.000	1.200.933.000		
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS	42.540.000	42.540.000		
3	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD	243.660.900	61.724.400	181.936.500	
4	Bimbingan teknis penyusunan formasi	-	-		
5	Validasi Data Base	-	-		
		1.487.133.900	1.305.197.400	181.936.500	
G Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	-	-		
2	Seleksi penerimaan calon PNS	275.983.060	269.432.600	6.550.460	
3	Penempatan PNS	54.983.400	50.335.400	4.648.000	
4	Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	190.445.500	189.392.250	1.053.250	
5	Pembangunan/pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah	463.577.150	279.809.650	183.767.500	
6	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	84.967.000	68.392.950	16.574.050	
7	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	-	-		
8	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	47.293.250	44.393.800	2.899.450	
9	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	327.004.800	324.004.800	3.000.000	
10	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	45.743.907	45.293.907	450.000	
		1.489.998.067	1.271.055.357	218.942.710	

Pada table menunjukan perbandingan biaya operasional yang dianggarkan dengan realisasinya pada tahun 2023. Dari data tersebut menunjukan biaya operasional dianggarkan sebesar Rp. 4.040.653.734 ,- dan realisasi sebesar Rp. 3.527.824.029,-

Untuk membuktikan pengendalian biaya operasional yang dilakukan Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Maka ini dapat dilihat melalui analisis varians biaya operasional yaitu suatu analisis yang berfungsi untuk

membandingkan antara biaya operasional yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui varians biaya operasional yang merugikan atau menguntungkan sebagai berikut :

Biaya operasional yang dianggarkan : Rp. 4.040.653.734

Biaya operasional yang sesungguhnya : Rp. 3.527.824.029,-

Varians biaya operasional Rp 476.516.236,-

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{3.527.824.029}{4.040.653.734} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas PAD tahun 2023 , jika dimasukan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 8,73% masih berada pada interval 60% yang berarti tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn bahwa kinerja keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat dari efektivitas PAD dimulai pada tahun 2021 7,40% pada tahun 2022 7,48% dan sebesar 8,73% pada tahun 2023.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Anggaran yang efektif dapat dilihat dari besarnya penyimpangan yang telah terjadi antara anggaran yang dibuat dengan realisasinya. Semakin kecilnya penyimpangan yang terjadi, maka anggaran tersebut makin efektif. Penyimpangan yang telah terjadi baik itu penyimpangan yang menguntungkan maupun penyimpangan yang merugikan jika penyimpangannya terlalu besar maka menandakan bahwa anggaran yang dibuat kurang efektif.

Agar anggaran yang akan datang lebih baik perlu lebih jeli lagi dalam memproyeksikan kegiatan atau kejadian operasional dalam instansi dan memperhitungkan dengan teliti biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan operasional instansi tersebut.

1. Tindak Lanjut Penyusunan Anggaran Yang Akan Datang

Tindak lanjut penyusunan anggaran yang akan datang pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya perlu mempertimbangkan penyusunan anggaran dan lebih mengestimasi biaya-biaya operasional dengan menggunakan acuan data biaya historis dan menetapkan anggaran sebagai alat penaksiran, sebagai plafond an sekaligus pengaturan otorisasi pengeluaran dana / kas serta menetapkan anggaran sebagai pengukuran efisiensi, khususnya yang mengalami penyimpangan yang merugikan.

2. Tindak Lanjut Pelaksanaan Anggaran Yang Akan Datang

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan akan merupakan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kegagalan pelaksanaan salah satu kegiatan akan mempunyai akibat terhadap kegiatan yang lain di dalam instansi.

Demikian besarnya pengaruh dari masing-masing kegiatan didalam perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan lainnya, sehingga bagi pimpinan instansi tidak ada pilihan lain kecuali berupa sebaik-baiknya agar pelaksanaan seluruh kegiatan dalam instansi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan anggaran pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan datang sebaiknya perlu memperhatikan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Seharusnya instansi hanya melaksanakan kegiatan

operasional yang telah dianggarkan instansi, sehingga dapat dihindari terjadinya penyimpangan yang merugikan yang cukup besar bagi instansi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :Kinerja keuangan inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari rasio efektivitas dimulai pada tahun 2021 sebesar 7,40% pada tahun 2022 sebesar 7,48% dan sebesar 8,73% pada tahun 2023 belum dapat berjalan secara efektif karena masih dibawah 60% walaupun berkembangannya setiap tahun mengalami kemajuan. Setelah mengetahui besarnya varians yang terjadi serta penyebab-penyebab yang mengakibatkan terjadinya varians, sehingga jika manajemen dapat memperoleh umpan balik dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya sehingga varians yang terjadi dapat ditekan.

Referensi

- Agus Ahyari, 2016. *Anggaran Perusahaan edisi ketiga*, BPFE. Yogyakarta.
- Charles T.H.2013. *Pembiayaan Perusahaan*. Rajawali Pers. Jakarta
- D. Hartanto, 2015. *Akuntansi Untuk Usahawan, Cetakan ketujuh*, FE Universitas Indonesia.Jakarta
- Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri.2016. *Anggaran Perusahaan*. Erlangga.Surabaya.
- Hardianto,2017. *Manajemen Keuangan*, Bina Aksara, Jakarta
- Marianis Sinaga,2016. *Akuntansi Biaya, Suatu Pendekatan Manajerial*.Erlangga .Surabaya.
- Mulyadi, 2016. *Akuntansi Biaya*, STIE Yokyakarta
- Nurdin, M., Noor, M. Y., & Sudirman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Keuangan Dan Tata Kelola Terhadap Pertumbuhan Perusahaan. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 11-20.
- R.A . Supriyono ,2017. *Akuntansi Manajemen I Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan*,BPFE Yogyakarta.
- Rahmi, S. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada instansi Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Suad Hasan ,2016. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Liberty. Yogyakarta.
- Sudirman, S., Sismar, A., & Dfinubun, Y. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 35-45.
- Tawakkal, U., Nasir, N., & Sudirman, S. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Pada Pt Solid Gold Berjangka Makassar. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 273-284.